

BAB I

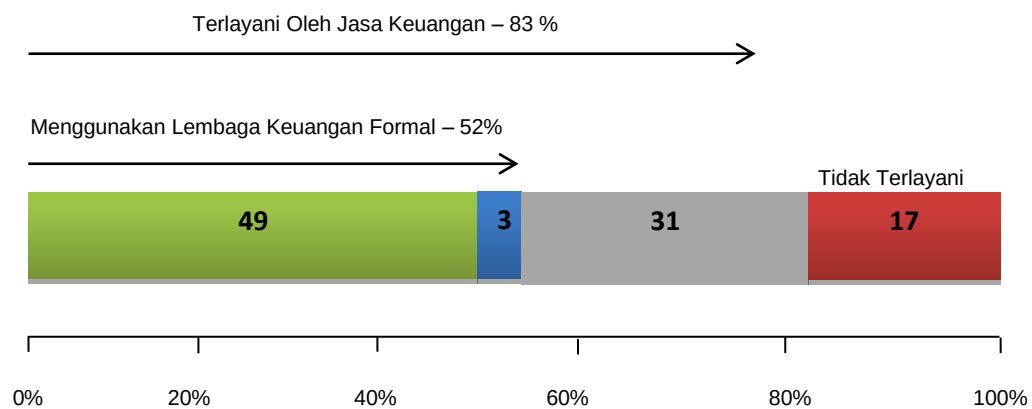
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2010: 2).

Salah satu produk bank yang dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif adalah kredit. Dengan kredit, kita dapat meningkatkan daya guna uang dan daya guna barang. Jika uang hanya di simpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan disalurkan kredit akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian untuk pemilik dana akan mendapat penghasilan tambahan (bunga bank). Dan untuk peningkatan daya guna barang, kredit yang disalurkan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya seorang pengusaha yang memperoleh dana dari bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tak terpakai menjadi menjadi barang-barang rumah tangga yang berguna (Kasmir, 2010: 107). Kegiatan pemanfaatan produk perbankan berupa kredit ini tidak terlepas dari kemudahan dan pemahaman masyarakat dalam mengakses jasa keuangan atau disebut *financial access*.

Interaksi dalam dunia bank maupun akses ke perbankan bukanlah sesuatu yang mudah. Terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman tentang bank hanya sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang. Sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering di artikan keliru. Hal itu dikarenakan pengenalan tentang dunia perbankan terhadap masyarakat sangat minim, mulai dari karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank serta pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk perbankan (Kasmir, 2010: 1).



Sumber: World Bank, 2009

Gambar 1.1 Akses Ke Layanan Jasa Keuangan di Indonesia

Keterangan:

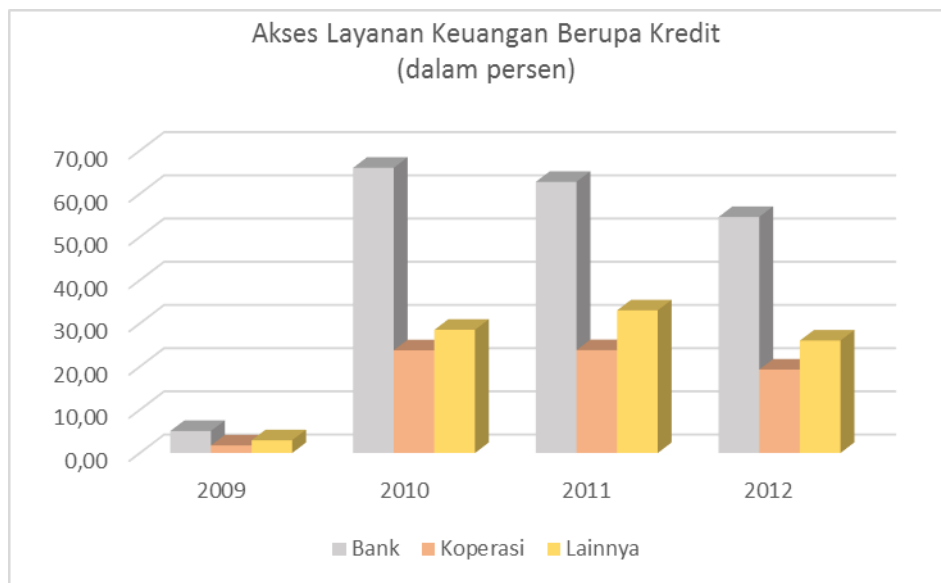
- Bank
- Selain Bank
- Lembaga Keuangan Informal dan Semi-formal
- Tidak Terlayani Oleh Lembaga Keuangan

Grafik di atas diperoleh dari 3.360 responden yang menunjukkan bahwa, 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (bank) dan 3% memiliki akses ke lembaga keuangan lain selain bank (Koperasi atau lembaga perkreditan lainnya). Sementara sekitar 17% dari total rumah tangga hidup tanpa akses ke salah satu produk perbankan dari lembaga keuangan formal ataupun nonformal. Pada umumnya masyarakat menabung atau menyimpan uang menggunakan bank, namun untuk penyediaan jasa pinjaman sekitar 31% masyarakat lebih umum ke arisan (lembaga keuangan semiformal) bahkan ke orang lain, yaitu keluarga/teman/tetangga/rentenir (lembaga keuangan informal). Tingkat akses keuangan Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Srilanka. Namun masih lebih baik dari Bangladesh dan Filipina. Dalam Survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia (2011) juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48% dan masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun lembaga non bank sekitar 52%.

Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank yang rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi, serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka (Buku Saku Keuangan Inklusif, 2014). Menurut Mehrens & Lehmann (1987), Quaye (2008), Akudugu et al (2009) mengatakan, rendahnya akses ini dikarenakan masalah kelayakan kredit yang dianggap berharga terutama pada masyarakat pedesaan, karena sebagian besar masyarakat hanya dimasukkan ke pasar keuangan melalui skema kredit yang dirancang secara khusus oleh pemerintah maupun dari perbankan sendiri. Layak atau tidaknya

calon nasabah dalam menerima kredit akan menunggu keputusan dari pihak bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, juga dapat berdasarkan alasan lain yang melatarbelakangi bank memberi kredit atau tidak pada nasabahnya (adanya *credit rationing*) (Akudugu, 2013: 01).

Kurangnya akses keuangan dapat membatasi jangkauan dan pelayanan kredit konsumsi rumah tangga dan usaha. *Financial access* atau akses keuangan mengacu pada kemungkinan individu atau perusahaan dapat mengakses pelayanan keuangan, termasuk kredit, deposito, pembayaran, asuransi, dan jasa manajemen resiko lainnya. Dalam penelitian ini akses keuangan dari sisi kredit yang menjadi fokus penelitian. Mereka yang tidak memiliki atau hanya memiliki akses yang terbatas pada jasa keuangan disebut sebagai *unbanked* atau *underbanked* (Kunt, et.al, 2008). Masyarakat miskin dan usaha kecil harus mengandalkan kekayaan pribadi mereka atau sumber internal untuk berinvestasi dalam usaha maupun pendidikan mereka, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi mereka (Kunt, et.al, 2008: 01). Sehingga bank tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat mengenai akses ke perbankan serta memudahkan tata operasional bank untuk masyarakat pedesaan.



Sumber: BPS, diolah (2012).

Gambar 1.2 Akses Layanan Keuangan Berupa Kredit di Jawa Timur

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa akses masyarakat pada lembaga keuangan bank terus meningkat dari 5,09% pada tahun 2009 menjadi 54,64% pada tahun 2012. Akses perbankan disini bukan hanya kredit pada program bank saja, namun program dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan juga seperti PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pada jasa keuangan terutama kredit. Peningkatan akses ini dipengaruhi oleh meningkatnya kredit dari program bank yang disalurkan pada masyarakat serta adanya salah satu program pemerintah (KUR) yang diterapkan pada tahun 2007 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2009 sehingga kredit yang disalurkan perbankan masih terbatas karena perbankan masih melakukan sosialisasi dan pemberdayaan tentang program kredit mereka kepada masyarakat dan masyarakatpun masih belum seluruhnya mengetahui program tersebut.

Masyarakat yang mengakses kredit pada koperasi juga mengalami peningkatan dari 1,77% pada tahun 2009 menjadi 19,33% pada tahun 2012, hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan manfaat mengakses kredit untuk mengembangkan usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka yang secara tidak langsung mereka telah mengakses salah satu lembaga keuangan berupa koperasi dalam kehidupan mereka yang akan meningkatkan perekonomian mereka. Dan sekitar 2,95% masyarakat yang mengakses kredit pada lembaga keuangan lain selain bank dan koperasi pada tahun 2009 yang meningkat menjadi 26,03% pada tahun 2012. Pengajuan kredit pada lembaga keuangan lain selain bank dan koperasi disini bersumber dari pinjaman perorangan (misalnya meminjam kepada keluarga, teman kantor, dan tetangga) dan lembaga lainnya seperti arisan, PKK, dan yang lainnya. Akses kredit masyarakat pada lembaga keuangan lainnya lebih tinggi dibanding akses kredit pada koperasi, hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui manfaat mengakses kredit pada koperasi maupun manfaat dari koperasi itu sendiri dan mereka merasa nyaman meminjam uang pada lembaga keuangan lainnya daripada pada koperasi. Bisa juga disebabkan karena masyarakat tidak bergabung menjadi anggota koperasi, sehingga mereka akan lebih banyak yang meminjam uang pada lembaga keuangan lain selain koperasi.

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan disebut *financial inclusion* (Word Bank, 2008; European Commisin 2008; McKillop dan Wilson 2007; Sinclair 2001). Komite pemerintah India

mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan akses ke produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat umum maupun masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau secara adil dan peraturan yang transparan.

Untuk mewujudkan akses layanan jasa keuangan yang luas terhadap masyarakat, BI telah meluncurkan program *National Strategy Financial Inclusion* (NSFI) yang merupakan cara utama untuk mengurangi kemiskinan, yaitu melalui peningkatan kemampuan individu dalam mengelola keuangannya. Diterapkannya kebijakan *financial inclusion* ini diharapkan masyarakat yang semula tidak pernah mengakses layanan jasa keuangan mempunyai kesempatan untuk mengakses layanan jasa keuangan terutama kredit. Berjalan atau tidaknya kebijakan tersebut sangat bergantung pada aparat yang berwenang, yaitu pemerintah, perbankan, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Juga dari beberapa indikator yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi akses masyarakat ke jasa keuangan terutama dari sisi kredit yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya: usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, serta beberapa indikator lainnya. Program akses ke jasa keuangan akan dimulai dari sektor perbankan, menurut Massey (2010) peran lembaga keuangan di negara berkembang adalah penting dalam mempromosikan inklusi keuangan (Paramasivan dan Ganeshkumar, 2013). Hampir semua sektor yang berkaitan dengan keuangan membutuhkan jasa bank, termasuk program penyaluran kredit kepada seluruh lapisan masyarakat oleh pemerintah (Kasmir, 2010: 2). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FINANCIAL ACCESS* (DARI SISI KREDIT)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi *financial access*.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi *financial access*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan berkaitan dengan *financial access*.

2. Bagi Perbankan

Diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif dalam merumuskan program kebijakan guna memperluas cakupan kebijakan yang dapat meningkatkan *financial access*.

3. Bagi Akademisi

Dapat menambah dan memberikan pengetahuan baru untuk dunia pendidikan, bahwa terdapat faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi *financial access* oleh masyarakat pada kredit perbankan. Sehingga tidak hanya faktor ekonomi saja yang mempengaruhi *financial access*. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan guna penyempurnaan penelitian yang sudah dan akan diteliti.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan ilmu baru dan sebagai pembelajaran awal untuk melakukan penelitian - penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan batasan yang akan diteliti yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi *financial access* dari sisi kredit. Hal ini dimaksudkan agar variabel dan pembahasan dalam penelitian sejalan dengan perumusan masalah yang akan diteliti, serta adanya keterbatasan dari peneliti seperti waktu, tenaga, pemilihan variabel, dan pengkajian teori-teori yang relevan serta kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan penelitian di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini secara garis besar memuat hal-hal yang mengacu pada pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang landasan teori serta konsep yang berkaitan dengan *financial access* yang telah diperoleh dari berbagai literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan. Selain itu, juga disampaikan penelitian sebelumnya, dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup ruang lingkup dan batasan penelitian serta perumusan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi variabel, hasil penelitian yang disertai pembahasan, pembuktian hipotesis, dan hasil akhir dari pengolahan data.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini yang mengemukakan kesimpulan, yaitu hasil yang diperoleh dari analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dengan dasar kesimpulan tersebut, akan dikemukakan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.